



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 797 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembentukan Peraturan Kepala Daerah untuk dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis perlu mempertimbangkan, memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Belitung Timur Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Belitung Timur Tahun 2025;
 - c. bahwa program pembentukan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

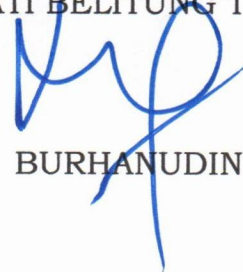
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	JUDUL PERBUP	MATERI YANG DIATUR	DASAR HUKUM	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PENGAJUAN	STATUS PERBUP		KET.
						BARU	REVISI	
1.	Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum Audit Kinerja 3. Perencanaan Audit Kinerja 4. Pelaksanaan Audit Kinerja 5. Komunikasi Hasil Audit Kinerja 6. Penutup 7. Format Dokumen Audit Kinerja	Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah No PED-09/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko	Inspektorat Daerah	Triwulan I	✓		
2.	Pedoman Audit Ketaatan	1. Pendahuluan 2. Perencanaan Audit Ketaatan 3. Pelaksanaan Audit Ketaatan 4. Pelaporan Audit Ketaatan 5. Tindak Lanjut Hasil Audit Ketaatan 6. Penutup	Peraturan Deputi Kepala Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan Dilingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Inspektorat Daerah	Triwulan I	✓		
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	1. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; 2. Pembentukan, tugas, dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan 3. Sumber Daya Manusia, layanan, sarana dan prasarana pada unit layanan disabilitas Pendidikan 4. Pembiayaan	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	Dinas Pendidikan	Triwulan I	✓		

4.	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	BAB I Ketentuan Umum a. Pengertian b. Maksud dan Tujuan c. Prinsip d. Sasaran e. Cakupan BAB II Bentuk Kekerasan BAB III Pencegahan dan Penanganan Kekerasan a. Penguatan Tata Kelola b. Edukasi c. Penyediaan Sarana dan Prasarana BAB IV Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan a. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan b. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan c. Sanksi bagi Kepala Satuan Pendidikan, TPPK dan Satuan Tugas BAB V Tata Cara Penanganan Kekerasan a. Umum b. Penerimaan Laporan c. Pemeriksaan d. Penyusunan, Kesimpulan dan Rekomendasi e. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan f. Pemulihan BAB VI Hak Korban, Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik Sebagai Terlapor Dalam Penanganan Kekerasan BAB VII Partisipasi Masyarakat BAB VIII Pengelolaan Data Kasus Kekerasan BAB IX Penghargaan BAB X Petunjuk Teknis BAB XI Pendanaan BAB XII Ketentuan Penutup	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Triwulan I	☒		
5.	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pedoman Pengembangan Aplikasi	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan I	☒		

6.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa	Perubahan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Pemerintahan Desa	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan I		✓	
7.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah	1. Prinsip, Norma, Standar, dan Kriteria 2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Prinsip Pengelolaan Data Statistik Sektoral 4. Tahapan Proses Bisnis Kegiatan Statistik 5. Koordinasi dan Kerja Sama 6. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha 7. Inovasi 8. Insentif 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Pembiayaan	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan I	✓		
8.	Pemberian Uang Santunan Penghargaan Kepada Veteran/Janda Veteran, Pejuang'45/Janda Pejuang 45' dan Warakawuri Pejuang	Pemberian Uang Santunan Penghargaan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Triwulan I	✓		
9.	Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang di Kabupaten Belitung Timur	Izin dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Triwulan I	✓		

10.	Standar Manajemen Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keamanan Informasi	Peraturan BSSB Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Triwulan I	✓		
11.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa	Perubahan Pedoman Pengelolaan Aset Desa	Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan I		✓	
12.	Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan I	✓		
13.	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Pemungutan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Triwulan I	✓		
14.	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati	Penganggaran, Penggunaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Keuangan dan Perencanaan Setda	Triwulan I	✓		
15.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berinvestasi	Klasifikasi dan Batasan Tata Cara Permohonan Tim Verifikasi Penilaian dan Pembobotan Pelaporan dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	DPMPTSP	Triwulan I	✓		

			Permendagri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah					
16.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Sistem dan prosedur pendaftaran, penilaian, pelaporan, pembayaran, penagihan, serta insentif pajak	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		
17.	Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Sistem dan prosedur pendaftaran, penilaian, pelaporan, pembayaran, penagihan, serta insentif pajak	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		
18.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu	Sistem dan prosedur pendaftaran, penilaian, pelaporan, pembayaran, penagihan, serta insentif pajak	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		
19.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame	Sistem dan prosedur pendaftaran, penilaian, pelaporan, pembayaran, penagihan, serta insentif pajak	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		
20.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah	Sistem dan Prosedur Pendataan, Pendaftaran, Pembayaran dan monev serta Nilai Perolehan Air Tanah	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		

21.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Sistem dan prosedur pendataan, pendaftaran, pemberian Insentif, serta Pengelolaan Opsen Pajak MBLB	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		
22.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet	Sistem dan prosedur pendaftaran, penilaian, pelaporan, pembayaran, penagihan, serta insentif pajak	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		
23.	Tata Cara Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Sistem dan prosedur Pengelolaan opsen pajak PKB dan BBNKB	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan I	✓		
24.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup 5. Sistematika 6. Pemantauan dan Evaluasi 7. Penutup	Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan I	✓		
25.	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Keputusan Menteri dalam Negeri 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur	Tim TPP (Sekretariat Daerah)	Triwulan I		✓	

			Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah					
26.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pengaturan penggunaan pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, upacara dan perangkat daerah urusan tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten Belitung Timur	Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan I	✓		
27.	Pedoman Tata Naskah Dinas	Penggunaan tata naskah dinas dan tata nakah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan I	✓		
28.	Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Lampiran Nomenklatur Jabatan Berdasrkan Hasil Validasi Evaluasi Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur oleh Menpan RB	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan I		✓	
29.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah	Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan I		✓	

30.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah	Penyesuaian Nomenklatur Unit Kerja dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan I		☒	
31.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UOBK RSUD Muhammad Zein pada Dinas Kesehatan	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UOBK RSUD Muhammad Zein	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan I	☒		
32.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT PKM Pada Dinas Kesehatan	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT PKM Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan I	☒		

33.	Tata Cara Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Belitung Timur	Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan I		☒	
34.	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif	Persiapan Pengisian JPT Pelaksanaan Pengisian JPT Monitoring dan Evaluasi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan I		☒	
35.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Perencanaan Pengadaan ASN Pengumuman Lowongan Pengadaan ASN Seleksi Pengadaan ASN Pengumuman Hasil Seleksi Pengadaan ASN Pengangkatan Hasil Pengadaan ASN	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan I		☒	

36.	Pedoman Pelaksanaan Coaching dan Mentoring Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pengembangan Kompetensi melalui pembinaan coaching dan mentoring	Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan I		✓	
37.	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Andalan Mandiri Pusat Terpadu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan I		✓	
38.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	1. Jenis Pelayanan Kesehatan 2. Komponen Tarif 3. Perhitungan Tarif 4. Besaran Tarif 5. Pembebasan Tarif 6. Pelaksanaantarif 7. Pengelolaan Penerimaan Tarif	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Triwulan I	✓		
39.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan <i>Tuberculosis</i> Kabupaten Belitung Timur	1. Target dan strategi nasional eliminasi TBC; 2. Pelaksanaan strategi nasional eliminasi TBC; 3. Tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah; 4. Koordinasi percepatan penanggulangan TBC; 5. Peran serta masyarakat; 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 7. Pendanaan	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulos	Dinas Kesehatan	Triwulan I	✓		

40.	Kebijakan Penerapan Program Yuk Gi Nyelik Pasien (YGNP) Kabupaten Belitung Timur	Petunjuk Teknis Pelayanan Yuk Gi Nyelik Pasien Kabupaten Belitung Timur	1. UU No. 17/2023 tentang Kesehatan 2. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. UU No.38/2014 tentang Keperawatan 4. Perpres No. 72/2012 tentang SKN 5. Permenkes No 39/2016 Tentang PIS-PK	Dinas Kesehatan	Triwulan I	☒		
41.	Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Perubahan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	Triwulan I		☒	
42.	Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Perubahan Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	Triwulan I		☒	

43.	Integrasi layanan Primer pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer pada Puskesmas, Pustu dan Posyandu, antara lain meliputi : 1. Struktur Organisasi 2. Jenis-jenis pelayanan 3. Indikator Kinerja	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri, Dokter Gigi; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu	Dinas Kesehatan	Triwulan I	☒		
44	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Konsumen dalam rangka program pengendalian inflasi di Kabupaten Belitung Timur melalui stabilisasi harga pangan strategis di tingkat konsumen terutama menjelang hari besar keagamaan atau dalam waktu dan kondisi tertentu ketika terjadi kenaikan harga	1. Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	Triwulan I	☒		

45	Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Risiko 4. Pengelolaan Risiko 5. Pelaporan 6. Ketentuan Lain-lain 7. Ketentuan Penutup	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Triwulan I	✓		
46	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMD atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah Daerah, termasuk pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	Triwulan II	✓		
47.	Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada	Penambahan kebijakan terkait property investasi dan perubahan lainnya	PMK Nomor 85/PM.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi	BPKPD	Triwulan II		✓	

	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur							
48.	Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Penambahan sistem dan prosedur terkait property investasi dan perubahan lainnya	PMK Nomor 85/PM.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi	BPKPD	Triwulan II		✓	
49.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan II	✓		
50.	Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pencabutan	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan II	✓		
51.	Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pencabutan	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan II	✓		
52.	Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pencabutan	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan II	✓		

53.	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan II	✓		
54.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Triwulan II	BPKPD	✓		
55.	Analisis Standar Belanja Tahun 2026	Standar Belanja berdasarkan Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan II	✓		
56.	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	Standar Harga Satuan berdasarkan Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Triwulan II	✓		
57.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Gambaran prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan anggaran pemerintah daerah untuk periode satu tahun, serta menjadi pedoman penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan II	✓		

			Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah					
58.	Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Bagian VIII Admin dan Pengguna Srikandi	Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sriakndi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belitung Timur	Triwulan II		✓	
59.	Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Lampiran Kode Klasifikasi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belitung Timur	Triwulan II		✓	
60.	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informas Kearsipan Naional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informas Kearsipan Naional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belitung Timur	Triwulan II	✓		
61.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Gambaran penyesuaian terhadap dokumen RKPD yang telah disusun sebelumnya untuk satu tahun anggaran berjalan. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan saat penyusunan RKPD awal, sehingga diperlukan penyesuaian pada program, kegiatan, dan prioritas pembangunan daerah.	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan II		✓	

			Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah					
62.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026	Gambaran perencanaan jangka menengah perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, yang bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara terstruktur.	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan II	☒		
63.	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026	Gambaran prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah untuk periode satu tahun untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan II	☒		

			Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah					
64.	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Ketentuan Umum Maksud dan Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pelaksanaan Kelembagaan Kerjasama Mekanisme Pelaporan Penganggaran Penutup	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan II	☒		
65.	Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas Kepada Kelompok Masyarakat	Tata Cara Pengusulan Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas Kepada Kelompok Masyarakat	Permendagri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan II	☒		
66.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	Perubahan pengelolaan cadangan pangan daerah	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	Triwulan II		☒	

67.	Pola Tata kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitang Timur	Pola Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitang Timur	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD	Triwulan II	✓		
68.	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian	pengelolaan layanan administrasi kepegawaian berbasis digital, meliputi fungsi, fitur, mekanisme operasional, pengelolaan data, keamanan, monitoring, sanksi, dan pendanaan untuk mendukung efisiensi, transparansi, serta perlindungan data.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan II	✓		
69.	Mekanisme Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	Proses Promosi dan mutasi PNS	Permendagri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan II	✓		
70.	Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang Berprestasi	Pemberian Penghargaan Dilakukan Melalui Penilaian Kinerja Dengan Kriteria Yang Telah Ditentukan	Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan II		✓	
71.	Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Proses Pengelolaan Kinerja ASN dari tahap Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, Tindak Lanjut Hasil evaluasi Kinerja	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan II	✓		

72	Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui jalur pendidikan dengan pemberian tugas belajar	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan II		☒	
73.	Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Peningkatan dan Pengembangan kompetensi ASN secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam program pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan II		☒	
74.	Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Suksesi Peta Talenta Pegawai Negeri Sipil	Rencana Suksesi penyusunan peta talenta berdasarkan dari perencanaan, pengembangan pola karier dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta	Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 ttg Manajemen Talenta ASN.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan II		☒	

			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.					
75.	Kendali Mutu	1. Pendahuluan 2. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis 3. Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP 4. Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana Dan Program Kerja Audit 5. Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit 6. Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit 7. Prosedur Pengendalian Mutu Pelaporan Audit 8. Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit 9. Pedoman Pengendalian Mutu Tata Usaha Dan Sumber Daya Manusia	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah	Triwulan II	✓		
76.	Pengaduan Masyarakat	Gambaran Umum Pengaduan Masyarakat; Perencanaan Penanganan DuMas; Pelaksanaan Penanganan DuMas; Kerjasama Penanganan DuMas; Penginformasian dan Pengkomunikasian Penanganan DuMas; Pelaporan Hasil Penanganan Dumas; Penanganan DuMas On Line; Penanganan DuMas Off Line; Format Formulir Penanganan DuMas	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2020 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah	Triwulan II	✓		

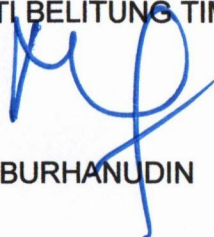
77.	Pedoman Pengelolaan Pengawasan Bidang Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Belitung Timur	Gambaran Umum Investigasi; Perencanaan Investigasi; Pelaksanaan Investigasi; Kerjasama Investigasi; Penginformasian dan Pengkomunikasian Investigasi; Pelaporan Hasil Investigasi; Format Dokumen Investigasi; Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Audit Investigasi; Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Audit/Pengawasan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi;	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Inspektorat Daerah	Triwulan II	☒		
78.	Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Petunjuk teknis SKM dan Forum Konsultasi Publik	PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan III	☒		
79.	Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029	Road Map Reformasi Birokrasi	PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reforasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan III	☒		
80.	Pedoman Penyusunan APBDes Perubahan T.A.2025	Tata cara penyusunan APBBDes perubahan	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan III		☒	

81.	Alokasi Dana Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025	Pengaturan besaran, tatacara dan syarat Alokasi dana desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan III	✓		
82.	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Indikator Mutu Pelayanan Pencapaian Kinerja Rumah Sakit	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan	RSUD	Triwulan III	✓		
83.	Fraud Control Plan (FCP)	Gambaran Umum FCP; Perencanaan FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Pelaksanaan FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut) ; Kerjasama FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Penginformasian dan Pengkomunikasian FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Pelaporan Hasil FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Format Dokumen FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Inspektorat Daerah	Triwulan III	✓		

84.	Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Inspektorat Daerah	Triwulan III	☒		
85.	Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026	Tata Cara Penyusunan APBDes	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan III	☒		
86.	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	Pengaturan Besaran, Tata Cara dan Syarat Alokasi Dana Desa	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan III	☒		
87.	Tata Cara Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha	Sistem dan Prosedur Pendaftaran, Penilaian, Pelaporan, Pembayaran, Penagihan, serta Insentif Retribusi Jasa Usaha	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Triwulan III	☒		

88.	Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pemberian Bantuan Hukum Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan III	☒		
89.	Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas Badan dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Perumda Air Minum	- Pedoman Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang paling banyak terdiri dari Gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan - Pedoman Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	Triwulan III	☒		
90.	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2027	Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 – 2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Belitung Timur selama 3 (tiga) tahun	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	Triwulan III	☒		

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN